

BAB V KESIMPULAN

Penelitian mengenai Penilaian Partisipatif Kemiskinan pada Wilayah Transisi Perdesaan ke Perkotaan di Kabupaten Sragen bertujuan untuk memberikan gambaran perubahan yang terjadi akibat urbanisasi serta pandangan dan penilaian rumah tangga miskin terhadap kondisi dirinya sendiri. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait implikasi kebijakan yang perlu dilakukan untuk pengentasan kemiskinan pada wilayah transisi perdesaan ke perkotaan. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga berisi rekomendasi bagi pemerintah yang dapat dilakukan guna menindaklanjuti penelitian ini.

5.1 Kesimpulan

Penilaian partisipatif kemiskinan memberikan perspektif lebih terhadap kondisi rumah tangga miskin pada wilayah transisi perdesaan ke perkotaan di Kabupaten Sragen dibandingkan dengan perhitungan-perhitungan kemiskinan konvensional. Pendekatan penilaian partisipatif kemiskinan dapat memberikan gambaran pemahaman masyarakat miskin tentang kemiskinan dan perampasan hak; kendala dalam mengakses layanan publik dan jasa; serta prioritas masyarakat miskin dalam rumusan kebijakan publik seperti yang telah dijelaskan oleh Norton dkk (2001). Melalui pelibatan secara langsung rumah tangga miskin ini kondisi lingkungan dan kehidupan serta penilaian terhadap kemiskinan dapat diketahui dan dijadikan dasar perumusan implikasi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan khusus di wilayah transisi perdesaan ke perkotaan.

Penilaian rumah tangga terkait penyebab kemiskinan menunjukkan bahwa mayoritas (44,97%) rumah tangga miskin menilai kemiskinan disebabkan oleh tidak adanya penghasilan. Hasil ini menunjukkan bahwa penghasilan dan pekerjaan merupakan faktor terpenting pembeda kemiskinan, selain dari faktor lain ketidakberdayaan (lansia, orang yang sakit atau cacat, dan orang yang tergantung terhadap bantuan), tidak memiliki aset, rumah tidak layak, sulit dalam bersaing, dan akses ke fasilitas yang terbatas. Berdasarkan pandangan tersebut, saat ini 29 rumah tangga miskin menilai bahwa telah terjadi perbaikan dalam kehidupannya hingga menjadi lebih sejahtera dan mampu keluar dari kemiskinan. Penilaian rumah tangga miskin ini didasarkan pada pandangan terhadap penyebab-penyebab kemiskinan yang sebelumnya telah dibahas. Secara keseluruhan, rumah tangga miskin menilai kondisi mereka saat ini sudah sedikit jauh lebih baik dari 10 tahun yang lalu dengan rata-rata penilaian pada angka 6,59 dari nilai maksimal 9. Rumah

tangga miskin juga lebih banyak menggambarkan kelebihan-kelebihan kondisi saat ini seperti kesempatan kerja yang lebih terbuka, fasilitas sudah lebih baik, dan perbaikan-perbaikan lain pada bidang sosial maupun ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan status perdesaan ke perkotaan cukup mampu meningkatkan potensi dan peluang bagi rumah tangga miskin untuk melangsungkan penghidupannya.

Antara tahun 2006 hingga 2016 telah terjadi beberapa perubahan lingkungan mulai dari perubahan ketersediaan fasilitas sosial, perubahan ketersediaan lapangan pekerjaan, dan perubahan kondisi lingkungan permukiman. Perubahan ini selanjutnya juga diikuti dengan perubahan-perubahan karakteristik penghidupan rumah tangga miskin. Penghidupan rumah tangga miskin bergantung pada beberapa faktor dan tidak hanya bergantung pada mata pencaharian, meski faktor pekerjaan sangatlah penting bagi rumah tangga miskin. Pada perkembangannya, urbanisasi mendorong peningkatan kualitas fasilitas tempat tinggal, ketenagakerjaan, dan perubahan kepemilikan aset dari rumah tangga miskin. Secara keseluruhan, rumah tangga miskin menilai kondisi mereka saat ini sudah sedikit jauh lebih baik dari 10 tahun lalu. Ketika diminta untuk membandingkan kondisi saat ini dan dahulu, rumah tangga miskin juga lebih banyak menggambarkan kelebihan-kelebihan kondisi saat ini.

Akan tetapi, perbaikan dan kelebihan kondisi akibat urbanisasi pada wilayah transisi perdesaan ke perkotaan ternyata belum dapat dimanfaatkan oleh seluruh rumah tangga miskin. Permasalahan yang paling umum ditemui adalah dominasi sektor swasta dalam penyediaan fasilitas sosial terutama fasilitas kesehatan sebagai bentuk respon kepada pasar. Respon dari sektor swasta ini ternyata tidak diikuti dengan upaya-upaya terstruktur oleh pemerintah untuk menyediakan dan pemeratakan akses terhadap fasilitas sosial (pendidikan, perbelanjaan, dan pendidikan). Kondisi lingkungan permukiman yang sudah cukup baik juga perlu dijaga agar implikasi negatif dari urbanisasi seperti pencemaran lingkungan dan fragmentasi sosial tidak terjadi. Kepemilikan dan akses terhadap aset-aset produktif juga perlu dijamin agar rumah tangga miskin tetap dapat melangsungkan penghidupannya. Pada beberapa aspek lain seperti penyediaan jaringan kebutuhan dasar (air dan sanitasi) dan lapangan pekerjaan aksesnya sangat perlu untuk ditingkatkan lebih merata. Peningkatan juga perlu dilakukan pada elemen lapangan pekerjaan dan tenaga kerja melalui dukungan terciptanya peluang-peluang ekonomi baru dan juga peningkatan kapasitas tenaga kerja agar dapat terserap pada pasar tenaga kerja. Berdasarkan penilaian partisipatif kemiskinan yang telah dilakukan, saat ini kesempatan kerja memang menjadi lebih terbuka namun tidak secara signifikan diiringi dengan perubahan pekerjaan dari tenaga kerja. Hal ini dilandasi oleh kompetensi tenaga kerja yang tergolong rendah sehingga tidak bisa terserap pada pasar tenaga kerja. Ini dibuktikan dari angka orang yang pernah terlibat mengikuti pelatihan keterampilan yang masih sangat rendah yaitu kurang dari 10%. Meski terdapat beberapa kepala keluarga yang

pekerjaannya telah berubah, perubahan yang terjadi masih pada sektor yang tidak terlalu produktif dan sifatnya subsisten.

Berdasarkan hal ini, intervensi dari pemerintah perlu dilakukan dengan tujuan agar urbanisasi yang terjadi dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin. Penerapan kebijakan tidak hanya berupa pemberian bantuan secara langsung kepada rumah tangga miskin, tetapi lebih kepada penyiapan lingkungan dan penghidupan rumah tangga miskin untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Beberapa implikasi kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah diantaranya terkait lingkungan rumah tangga miskin berupa perbaikan dan pemerataan fasilitas sosial, peningkatan kesempatan ke lapangan pekerjaan, dan peningkatan kondisi lingkungan permukiman serta terkait dengan penghidupan rumah tangga miskin berupa perbaikan dan pemerataan fasilitas tempat tinggal, peningkatan kapasitas tenaga kerja, dan jaminan kepemilikan aset. Implikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah ini merupakan sebuah proses terstruktur dalam menyiapkan dan merencanakan lingkungan yang dapat mendukung kesejahteraan rumah tangga miskin untuk dapat bersaing pada wilayah transisi perdesaan ke perkotaan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diperlukan tindak lanjut oleh pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan pada wilayah transisi perdesaan ke perkotaan di Kabupaten Sragen. Perubahan-perubahan yang terjadi pada wilayah transisi perdesaan ke perkotaan membutuhkan penanganan dengan cara-cara berbeda dari yang dilakukan di wilayah perdesaan ataupun wilayah perkotaan terutama terkait dengan masalah kemiskinan. Rumusan rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Sragen dalam upaya pengentasan kemiskinan pada wilayah transisi.

Kedepannya, penyusunan kebijakan perlu disesuaikan dengan kondisi yang secara riil terjadi dan dirasakan rumah tangga miskin. Terutama pada wilayah transisi yang memiliki percampuran karakteristik wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan. Perlu dilakukan pendekatan-pendekatan yang lebih lokal, kompleks, beragam dan dinamis untuk menangkap secara lebih tepat perubahan karakteristik kemiskinan yang terjadi. Rumah tangga miskin perlu dilibatkan lebih jauh untuk mengidentifikasi, dan menilai kondisi kemiskinannya serta merumuskan implikasi kebijakan yang dibutuhkan untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Terdapat berbagai cara dalam menilai atau mengukur kemiskinan, salah satunya melalui *Participatory Poverty Assessment (PPA)* atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai Penilaian Partisipatif Kemiskinan menekankan pada pelibatan secara langsung penduduk miskin.

Kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah tidak cukup hanya dengan bantuan langsung, seperti yang ada selama ini. Kebijakan yang langsung menyasar pada kebutuhan

rumah tangga miskin perlu dilakukan, akan tetapi hanya pada rumah tangga dengan kondisi yang benar-benar tidak berdaya. Sedangkan bagi rumah tangga miskin pada wilayah transisi perdesaan ke perkotaan lebih tepat untuk menyiapkan dan merencanakan lingkungan serta penghidupan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Perlu adanya kebijakan terutama terkait dengan perbaikan dan pemerataan fasilitas sosial, peningkatan kesempatan ke lapangan pekerjaan, peningkatan kondisi lingkungan permukiman, perbaikan dan pemerataan fasilitas tempat tinggal, peningkatan kapasitas tenaga kerja, dan jaminan kepemilikan aset untuk meningkatkan kesejahteraan.

Perlu adanya perhatian dan penanaman khusus dari pemerintah terhadap wilayah-wilayah transisi perdesaan ke perkotaan dikarenakan karakteristiknya yang berbeda dari wilayah perdesaan maupun perkotaan pada umumnya. Kabupaten Sragen didominasi oleh kota-kota kecil yang merupakan daerah transisi antara wilayah perdesaan ke perkotaan. Pada perkembangannya karakteristik perdesaan bisa jadi masih sangat kuat melekat pada kemiskinan di wilayah transisi perdesaan ke perkotaan semacam ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami perubahan spasial desa dengan status perkotaan dalam kaitannya dengan memahami masalah kemiskinan di daerah transisi perdesaan ke perkotaan dan merumuskan implikasi kebijakan yang dibutuhkan untuk tujuan pengentasan kemiskinan.